
Kerjasama Multilateral G20 dalam Mendukung Pemulihan Negara-Negara Rentan Terhadap Pandemi Covid-19

Rahmiyani Auditia Suherman^{1*}, Muh. Asy'ari¹

¹International Relations Department, Faculty of Social and Political Sciences, Bosowa University, Makassar
*e-mail: rahmysuherman11@gmail.com

Abstract: This research aims to examine the G20 multilateral cooperation in supporting the recovery of vulnerable countries from the Covid-19 pandemic. The G20 focused its effort on the aspects of health response and economic recovery which are based on the commitments of the G20 Action Plan. This writing uses the concept of multilateralism through indicators of indivisibility and diffuse reciprocity to describe the implementation of the G20 commitments. Through this writing, the authors argue that the G20 multilateral cooperation in supporting recovery in vulnerable countries has not been implemented optimally according to the commitments of ACT-A and COVAX and DSSI. However, the Pandemic Fund's commitment is still expected to achieve its goals.

Keywords: G20, vulnerable countries, health response, economic recovery.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerjasama multilateral G20 dalam mendukung pemulihan negara-negara rentan akibat pandemi Covid-19. Upaya G20 ini ditujukan pada aspek respon kesehatan dan pemulihan ekonomi yang didasarkan pada komitmen Rencana Aksi G20. Penelitian ini menggunakan konsep multilateralisme melalui indikator ketidakterpisahan (*indivisibility*) dan manfaat yang setara (*diffuse reciprocity*) untuk menjabarkan implementasi komitmen G20. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerjasama multilateral G20 dalam mendukung pemulihan di negara-negara rentan belum dilaksanakan secara optimal pada komitmen ACT-A dan COVAX serta DSSI. Meskipun, komitmen Pandemic Fund masih diharapkan dapat mencapai tujuan.

Kata Kunci: G20, negara rentan, respon kesehatan, pemulihan ekonomi.

1. Latar Belakang

Kemunculan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang pertama kali diidentifikasi dari wabah di Wuhan, China pada Desember 2019, telah menciptakan situasi darurat kesehatan yang menjalar ke ratusan negara lintas benua (OECD, 2020). Virus Covid-19 telah menjangkit lebih dari 800 ribu orang dan 40 ribu kasus kematian di 213 negara dan dua kawasan per 31 Maret 2020. Amerika Serikat menjadi negara dengan 160 ribu kasus Covid-19 tertinggi dan 105 ribu di Italia. Italia menjadi negara dengan 12 ribu kasus dan angka kematian terbanyak pada Maret 2020 (*World Health Organization*, 2020).

Menanggapi kasus penularan yang hampir menyentuh satu juta kasus tersebut, negara-negara memberlakukan pembatasan sosial ketat (*lockdown*) untuk mengurangi tingkat penularan virus pada awal April 2020. Tetapi, hal ini masih belum dapat menekan laju penularan virus. Kasus Covid-19 kian memarah setiap bulannya di berbagai negara. Pada saat yang sama, pembatasan sosial ini justru berbenturan dengan ekonomi global yang mengakibatkan negara-negara masuk ke dalam resesi ekonomi. Amerika Serikat menghadapi lonjakan pengangguran yang tinggi akibat pandemi yang sebelumnya dari 4,4% di bulan Maret menjadi 14,7% di bulan April 2020. Adapun jumlah pengangguran dari 15,9 juta menjadi 23,1 juta di bulan April (*Bureau of Labor Statistics*, 2020). Di Brazil, penguncian dan pemberian bantuan berkontribusi pada penurunan tingkat partisipasi pada kuartal Juli-September 2020 menyebabkan 13,7 juta orang mengundurkan diri dari pasar tenaga kerja (Unidas, 2021).

Ekonomi global yang berkontraksi akibat pandemi Covid-19 tersebut telah menyebabkan sebagian besar negara-negara rentan (negara berpenghasilan rendah dan menengah) terutama di Afrika dan

negara pulau kecil menjadi sangat rentan terhadap dampak langsung dan tidak langsung dari pandemi Covid-19 seperti tekanan sosial, kerawanan pangan akut, meningkatnya ketidaksetaraan, dan kemunduran pembangunan yang parah. Pada negara berpenghasilan rendah, dampak sosial-ekonomi kian memarah seiring tingginya tingkat penularan Covid-19. Diversifikasi ekspor yang terbatas telah meningkatkan kerentanan negara-negara berpenghasilan rendah terhadap perdagangan global. Situasi ini turut berdampak pada sektor pariwisata internasional dan menyebabkan turunnya lapangan pekerjaan di banyak negara berpenghasilan rendah. Permintaan ekspor yang tidak stabil dan jatuhnya harga komoditas seperti minyak dan gas telah mengakibatkan masalah neraca pembayaran dan dampak buruk lainnya. Di saat yang sama, situasi keuangan di negara-negara berpenghasilan rendah semakin diperburuk akibat jatuhnya investasi asing langsung dan pengiriman uang, serta hampir setengah dari negara-negara ini berisiko tinggi pada utang yang melampau tinggi (United Nations, 2021). Oleh karenanya, negara-negara ini memerlukan penanganan segera untuk mencegah dampak pandemi mengancam struktur sosial-ekonomi dan sistem kesehatan. Tetapi, adanya keterbatasan ruang fiskal negara berpenghasilan rendah dan menengah menjadikan pemulihan cukup sulit dilakukan untuk dapat mengatasi tantangan kesehatan dan ekonomi yang terjadi di negara tersebut (G20 Riyadh Summit, 2020a). Besarnya dampak krisis Covid-19 memerlukan tanggapan yang terkoordinasi dan terarah untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Urgensi kesehatan, sosial, dan ekonomi ini membutuhkan tindakan segera dan substansial untuk mendukung pemulihan negara-negara. Sehingga, hal ini kemudian mendorong kerja sama multilateral sebagai langkah yang tepat untuk bersama-sama menekan kerusakan jangka panjang dan mengendalikan penularan virus Covid-19.

G20 sebagai forum multilateral yang mewakili 80% perekonomian dunia mengambil tindakan kolektif untuk memandu negara-negara dalam mengatasi masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi. Melalui KTT Luar Biasa pada Maret 2020, G20 berkomitmen untuk berupaya memberikan bantuan kepada semua negara yang membutuhkan bantuan untuk memperkuat pembangunan kapasitas dan bantuan teknis dalam menghadapi pandemi serta siap memobilisasi dukungan pembangunan dan kemanusiaan (G20 Riyadh Summit, 2020b). G20 menunjukkan respon dan konsesusnya dalam respon kolektif yang tertuang dalam Rencana Aksi G20 (*G20 Action Plan in Response to Covid-19 Pandemic*) yang terdiri atas komitmen-komitmen dari koordinasi kebijakan negara anggota serta koordinasi dengan jaringan global yang meliputi interaksi antara institusi internasional yaitu IMF, WTO, WHO, dan Bank Dunia, serta organisasi regional. Respon kolektif ini bertujuan untuk melindungi kesehatan, pekerjaan, dan pendapatan masyarakat; menjaga stabilitas keuangan dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi; meminimalkan gangguan pada rantai pasokan global; serta memberikan bantuan kepada negara yang rentan dalam merespon dampak pandemi (*G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting*, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kerja sama multilateral G20 dalam mendukung upaya pemulihan negara-negara yang rentan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti akan mencoba menjelaskan tentang subjek penelitian secara deskriptif. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka digital. Penelaahan dilakukan pada data sekunder seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal, serta *website-website* yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Agar bersifat sistematis, peneliti akan menggunakan tiga tahapan penelitian kualitatif sebagaimana menurut Creswell, yaitu pengumpulan data, analisis data, serta pemaknaan atau interpretasi data (Creswell, 2014).

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. *Indivisibility terhadap Respon Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi dalam Rencana Aksi G20*

Komitmen-komitmen G20 yang dibuat merupakan upaya negara G20 dan lembaga internasional dalam menghadapi risiko kerentanan kesehatan dan keruntuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 melalui koordinasi kebijakan. Hal ini didasari oleh kepentingan nasional negara G20 yang sama dan sebagai forum yang mewakili 80 persen perekonomian dunia mengambil tindakan sigap dalam membantu upaya pengendalian laju penularan infeksi dan perbaikan dampak ekonomi untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kepentingan nasional yang sama ini kemudian melahirkan ketidakterpisahan kepentingan (*indivisibility*) dalam lingkup multilateralisme G20.

Merebaknya kasus infeksi Covid-19 secara global memunculkan momentum untuk saling mengkoordinasikan kebijakan antarnegara G20 dalam mengatasi krisis terhadap sistem kesehatan dan ekonomi. Seperti yang dinyatakan oleh Ruggie (1992) bahwa *indivisibility* juga merujuk pada kepatuhan negara anggota. Dalam hal ini, negara G20 diharapkan mampu melaksanakan komitmen-komitmen yang telah disepakati.

3.1.1. *Komitmen G20 terhadap ACT-A dan COVAX*

Sebagaimana dalam respon kesehatan G20 melalui slogan “no one is safe, until everyone is” yang menunjuk pada pentingnya kerja sama kesehatan antarnegara dalam meminimalkan laju penularan infeksi Covid-19. Tentu pada dasarnya, semua negara memperjuangkan langkah kebijakan yang paling tepat dalam menekan tingginya penularan infeksi, dengan vaksinasi menjadi opsi pemulihan terpenting. Forum G20 sebagai instrumen untuk mendorong kerja sama vaksin melalui *Access to Covid-19 Tools Accelerator* (ACT-A) dan *COVAX Facility* dengan memberikan upaya respon kesehatan yang pasti terhadap penyediaan dan penyaluran vaksin. COVAX AMC (*Advanced Market Commitment*) juga menyediakan vaksin bersubsidi penuh yang diberikan kepada negara yang memenuhi syarat. COVAX sendiri dipimpin bersama oleh WHO, Gavi, *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI), serta UNICEF sebagai mitra pelaksana.

G20 telah berkomitmen untuk mendukung kesenjangan pembiayaan ACT-A dalam penanganan respon Covid-19. Hal ini sangat penting bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah, yang telah memperoleh 80% dan 30% dosis masing-masing dari inisiatif COVAX (World Health Organization, 2021). Melalui mekanisme *fair share* dalam penentuan target kontribusi negara G20 yang diharapkan didasarkan pada PDB masing-masing negara dan keterbukaan ekonomi, sehingga negara dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi memberikan kontribusi yang lebih tinggi. Pembiayaan melalui mekanisme *fair share* ini dilakukan untuk mendukung pemerataan tes, perawatan, vaksin, dan alat pelindung melalui ACT-A. Dalam perhitungan Oktober 2020-2022, negara G20 berkontribusi pada pendanaan ACT-A, sebagaimana berikut:

Tabel 1. Kontribusi G20 pada Pendanaan ACT-A

Anggota G20	Total Fair Share (USD Juta)	Total Komitmen (USD Juta)	Total Komitmen Fair Share (%)
Jerman	3228	3903	121%
Kanada	1629	1476	91%
Arab Saudi	475	314	66%
Amerika Serikat	15764	7479	47%
Italia	1235	585	47%
Inggris	2583	1216	47%
Jepang	3863	1775	46%
Prancis	1969	521	26%
Australia	1227	216	18%
Korea	1248	212	17%
Brazil	801	87	11%
China	5645	116	2%

Indonesia	249	1	0.4%
Meksiko	663	1	0.2%
India	618	0	0%
Rusia	799	0	0%
Turki	446	0	0%
Argentina	237	0	0%
Afrika Selatan	17	0	0%

(World Health Organization, 2022).

Tabel 1. menunjukkan bahwa mayoritas negara G20 tidak memenuhi komitmen kontribusi *fair share*. Seperti pada Prancis hanya berkomitmen USD 521 juta dibandingkan dengan ekspektasi USD 2 miliar mengingat tingkat pendapatannya, atau 26% dari *fair share*. Sebaliknya, Jerman telah mengalokasikan 121% dari *fair share*.

Selain dari pada dukungan pendanaan, G20 berkomitmen menyediakan vaksin secara adil dan berimbang, tetapi pada realitanya memunculkan fenomena kesenjangan vaksin global di antara negara berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah.

Kesenjangan vaksinasi global terlihat signifikan dengan persentase penerimaan vaksin di negara maju sebesar 83 persen dan negara berkembang hanya 17 persen dari rantai pasokan, di mana 17 persen tersebut diperuntukkan kepada 47 persen populasi dunia pada pelaporan Mei tahun 2021. Di saat sejumlah negara telah memvaksinasi kelompok berisiko rendah seperti anak-anak dan usia belia, hanya ada 0,3 persen suplai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah (Kompas, 2021). Sedangkan pada September 2021, hanya sekitar tiga persen di negara berpenghasilan rendah telah divaksinasi dengan setidaknya hanya satu dosis dibandingkan 60,18 persen di negara berekonomi maju (United Nations, 2022). Rata-rata negara G20 menerima pasokan dosis vaksin 15 kali lebih tinggi dari dosis yang diberikan per kapita ke negara-negara Afrika sub-Sahara dan 15 kali lebih tinggi dari dosis yang diberikan per kapita ke negara berpenghasilan rendah (UNICEF, 2021).

Negara G20 telah berkomitmen menyediakan vaksin ke negara-negara berkembang melalui donasi kelebihan dosis dan mempromosikan produksi dan pasokan penanggulangan medis kepada negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah dengan cara yang bertanggung jawab dan tepat waktu melalui COVAX (IFPMA, 2021). Amerika Serikat sendiri memimpin upaya internasional dan koordinasi untuk mempercepat akses ke vaksin yang aman dan efektif untuk memenuhi kebutuhan global. Hingga Desember 2022, Amerika telah mendonasikan 671 juta dosis vaksin ke 116 negara melalui mekanisme COVAX, Caricom, AVAT, dan secara bilateral, serta menyumbang USD 4 miliar kepada Gavi untuk mendukung COVAX dalam pendistribusian vaksin yang merata ke seluruh dunia (Share America, 2022).

Namun, dosis yang dijanjikan ini bergerak lambat. Dari 1,3 miliar dosis tambahan yang dijanjikan negara G20 untuk disumbangkan, hanya 356 juta dosis yang telah diberikan kepada COVAX. Negara-negara Afrika khususnya sebagian besar dibiarkan tanpa akses ke vaksin Covid-19. Kurang dari 5 persen populasi Afrika divaksinasi penuh, membuat banyak negara berisiko tinggi mengalami wabah yang lebih lanjut (UNICEF, 2021).

Kesenjangan ini juga didorong oleh rantai pasokan global vaksin yang terhambat. Seperti pada 7 Oktober 2021, COVAX *Facility* telah mengirimkan lebih dari 339 juta dosis ke 144 negara dan teritori dengan 262 juta di antaranya ke negara AMC. Jumlah ini sangat tertinggal dari target awal yakni 2 miliar dosis yang akan dikirimkan ke seluruh dunia hingga pada akhir 2021 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, 2021). Bahkan hingga 17 Januari 2022, COVAX masih hanya mengirimkan 1 miliar dosis ke 144 negara (Gavi, 2022). Kondisi ini kemudian menyebutkan fakta yang signifikan tentang adanya kesenjangan global atas akses vaksin Covid-19.

Hal ini semakin diperjelas melalui target vaksinasi yang diusulkan *Multi Leaders Taskforce* (MLT) – sebuah formasi yang didirikan oleh IMF, Bank Dunia, WHO, dan WTO – di mana setiap negara minimal memvaksinasi 40 persen dari total populasi pada akhir tahun 2021 dan minimal 70 persen pada pertengahan tahun 2022. Tercatat 36 negara hanya memvaksinasi kurang dari 10 persen dari jumlah populasinya hingga akhir tahun 2021, seperti negara-negara Afrika, Syria, Haiti, dan Afganistan (NPR, 2022).

Aliansi Afrika menyebutkan kurangnya akses terhadap vaksin dan sistem global yang tidak memprioritaskan negara-negara Afrika menjadi alasan negara-negara Afrika sulit mendapatkan pasokan vaksin (NPR, 2022). Negara-negara berpenghasilan tinggi mendapatkan manfaat dari *Advance Purchase Agreements* (APA) dengan perusahaan farmasi, dengan pemesanan di muka seringkali jauh melebihi kebutuhan. Hal ini untuk mengurangi risiko vaksin tidak berhasil dan jadwal produksi yang tidak pasti. Tetapi, hal tersebut sangat menghambat kemampuan negara-negara miskin untuk mendapatkan vaksin secara langsung dan kemampuan COVAX untuk mendapatkan vaksin bagi negara-negara AMC dan mengalokasikannya sesuai dengan prinsip WHO (Wouters et al., 2021). Hal ini mencerminkan fakta kemampuan negara maju dalam melakukan pembelian vaksin secara berlebihan dalam konteks kelangkaan vaksin telah mendorong ketidakseimbangan kekuatan global (Samman, 2022).

3.1.2. Komitmen G20 terhadap Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respon (PPR) Pandemi

Selain upaya G20 dalam mendanai dan mendonasikan vaksin yang merata ke negara berpenghasilan rendah dan menengah, juga penting untuk mengoordinasikan mekanisme jangka panjang dalam penguatan arsitektur kesehatan global. Dengan demikian, G20 mendukung upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon (PPR) terhadap pandemi yang akan datang. Selama tiga tahun, G20 telah menghadapi disrupsi yang menenggangkan ribuan korban jiwa dan meruntuhkan perekonomian global. Adanya kesamaan kepentingan atau *indivisibility* ini mendorong G20 harus memastikan ketahanan komunitas internasional dalam menghadapi krisis pandemi.

G20 berupaya meningkatkan koordinasi dalam kesiapsiagaan terhadap risiko pandemi yang kemungkinan akan terjadi di masa mendatang. Melalui Presidensi G20 Italia, terdapat usulan untuk mengatur keuangan secara sistematis dan berkelanjutan guna mengurangi kerentanan dunia terhadap pandemi di masa depan. Hal ini menunjukkan kesepakatan G20 dalam tindakan untuk mencegah atau menghentikan pandemi berikutnya harus segera dilakukan. Oleh karena itu pada Oktober 2021, para pemimpin G20 berkomitmen untuk mengembangkan fasilitas keuangan untuk memastikan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan untuk PPR pandemi (Kementerian Keuangan, 2022a).

Melalui Satuan Tugas Keuangan dan Kesehatan G20 (*G20 Joint Finance-Health Task Force*) dalam meningkatkan kerja sama global tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon (PPR) terhadap pandemi, G20 mendorong tindakan kolektif pada upaya efektifitas penatagunaan sumber daya untuk kesiapsiagaan dan respon pandemi (PPR) serta meningkatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. G20 JFHTF ini secara inklusif berkoordinasi dengan WHO dan Bank Dunia, didorong oleh negara G20 dan melibatkan negara-negara berpenghasilan rendah serta menengah, mitra non-G20, dan Bank Pembangunan Multilateral dalam memastikan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi (G20 Rome Leaders' Declaration, 2021).

Kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan investasi dalam penguatan kapasitas negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah terkait PPR terhadap ancaman kesehatan global di masa depan, G20 JFHTF menunjukkan hasil nyata dengan dibentuknya *Pandemic Prevention Preparedness and Response Financial Intermediary Fund* (PPR-FIF) atau *Pandemic Fund* oleh Dewan Pengurusnya pada 8 September 2022 serta diluncurkan secara resmi pada KTT Presidensi G20 Indonesia di tengah pertemuan G20 JFHTF pada 13 November 2022 (World Bank, 2022b).

Berdasarkan kajian Bank Dunia dan WHO, *Pandemic Fund* membutuhkan pembiayaan USD 31,1 miliar setiap tahunnya untuk membiayai sistem PPR. Hingga KTT Presidensi G20 Indonesia, *Pandemic Fund* telah berhasil mengumpulkan dana sebesar USD 1,4 miliar yang telah dijanjikan oleh sejumlah kontributor, yakni negara G20, negara non-G20, dan lembaga-lembaga filantropi (World Bank, 2022c). Komitmen tersebut diperkirakan akan terus tumbuh seiring kepercayaan dan minat global untuk berkontribusi dalam peningkatan dana tersebut. Sekretariat *Pandemic Fund* akan mengintensifkan kinerja bersama Dewan Pengurus dan berkonsultasi dengan Bank Dunia, WHO, *Civil Society Organization* (CSO), dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu mengoperasionalkan dana tersebut.

Pandemic Fund memberikan aliran tambahan pembiayaan jangka panjang khusus untuk memperkuat kemampuan PPR di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah serta mengatasi kesenjangan kritis melalui investasi dan dukungan teknis di tingkat nasional, regional, dan global. Dana tersebut akan memanfaatkan kekuatan dan keunggulan komparatif dari lembaga-lembaga utama yang terlibat dalam PPR, memberikan dukungan pelengkap, meningkatkan koordinasi di antara para mitra, mendorong peningkatan investasi negara, berfungsi sebagai platform untuk advokasi, dan meningkatkan penguatan sistem kesehatan (Povlo, 2022).

G20 JFHTF telah memainkan peranan penting dalam pengembangan dan desain *Pandemic Fund* untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk memperkuat PPR pandemi dan mengisi kesenjangan kapasitas di tingkat negara, regional, dan global (Kementerian Keuangan, 2022a). Upaya ini menggarisbawahi adanya komunikasi dan kolaborasi yang harus dipertahankan oleh negara G20 untuk mewujudkan upaya penguatan arsitektur kesehatan.

3.1.3. Komitmen G20 terhadap *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI)

Ketidakterpisahan kepentingan (*indivisibility*) G20 juga dilaksanakan pada upaya pemulihan ekonomi. Berbagai negara menghadapi momentum sinkronisasi penurunan pada berbagai sektor ekonomi. Kurangnya ruang fiskal negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam penanganan risiko kesehatan Covid-19 yang disebabkan oleh pembiayaan dialihkan ke pembayaran utang, menjadi perhatian global bahwa adanya ketidakmampuan negara-negara tersebut untuk mengendalikan laju penularan Covid-19. Sebagian besar negara kekurangan akses ke sumber daya tersebut sehingga bergantung pada bantuan multilateral.

G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional, G20 mengimplementasikan rencana keringanan utang untuk membantu negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk mengatasi pandemi Covid-19, tekanan utang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pada Mei 2020, Bank Dunia dan IMF mendesak G20 untuk membentuk *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI) atau Prakarsa Penangguhan Layanan Utang untuk negara-negara termiskin yang memintanya. Tujuan skema ini adalah untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah mengatasi pandemi Covid-19 dengan menangguhkan pembayaran utang luar negeri dari Mei 2020 hingga Desember 2020 dan membebaskan uang untuk dibelanjakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Melalui pertimbangan akan kebutuhan fiskal yang semakin meningkat dalam penanganan Covid-19, DSSI diperpanjang hingga Juni 2021 dan diperpanjang kembali hingga Desember 2021. Skema G20 menawarkan untuk menangguhkan pembayaran utang luar negeri kepada pemerintah lain (utang bilateral) untuk 73 negara yang memenuhi syarat. Terdapat 48 dari 73 negara yang memenuhi syarat berpartisipasi dalam prakarsa ini hingga akhir Desember 2021 (World Bank, 2022a).

Pada April 2020, G20 meminta kreditur swasta yang bekerja melalui Institut Keuangan Internasional (IFI) untuk berpartisipasi dalam inisiatif dengan persyaratan yang sebanding. G20 meminta bank pembangunan multilateral untuk mengeksplorasi lebih lanjut opsi penangguhan pembayaran layanan utang selama periode penangguhan. Untuk tahun 2020, G20 memperkirakan lebih dari USD

20 miliar pembayaran utang yang akan ditanggihkan dengan pembayaran utang bilateral sebesar USD 12 miliar hingga USD 14 miliar dan pembayaran utang lebih lanjut sebesar USD 8 miliar kepada kreditur swasta eksternal. Hal ini kemudian akan membebaskan negara untuk mendanai penanganan pada sistem kesehatan dan memerangi pandemic Covid-19 (Reuters, 2020).

Skema DSSI yang diperpanjang hingga akhir tahun 2021, sehingga secara proporsional menunjukkan bahwa pembayaran utang yang ditanggihkan dengan tujuan awal USD 20 miliar selama delapan bulan (Mei-Desember 2020) seharusnya meningkat menjadi USD 35 miliar pada Juni 2021 dan USD 50 miliar pada akhir tahun 2021 (Jubilee Debt Campaign, 2021).

Namun, pada Desember 2021, IMF melaporkan bahwa G20 DSSI hanya menanggihkan pembayaran utang USD 12,9 miliar terhitung sejak awal Mei 2020 dan akhir Juni 2021 (World Bank, 2022a). Upaya G20 menjadi kurang optimal dalam meningkatkan langkah-langkah keringan utang. Hal ini dikarenakan G20 gagal meminta semua kreditur untuk berpartisipasi. Hanya 48 dari 73 negara berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat yang berusaha mengajukan inisiatif (penangguhan pembayaran utang) kepada kreditur bilateral resmi. Dikarenakan cakupan ruang lingkup pembayaran utang yang terbatas, pembayaran utang yang ditanggihkan hingga Juli 2021 hanya berjumlah USD 4,6 miliar dan hingga Desember 2021 berjumlah USD 12,9 miliar (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, 2022).

G20 terus meminta kreditur swasta untuk mengambil bagian dalam penangguhan, tetapi tidak mengambil tindakan apa pun untuk mendesak para kreditur untuk berpartisipasi. Dikarenakan kreditur swasta tidak dituntut untuk berpartisipasi dalam penangguhan utang, hal ini menyebabkan pembayaran utang terus dibayar penuh selama pandemi. Kreditur swasta menerima sekitar USD 14,9 miliar pembayaran utang dari 48 negara sejak pandemi dimulai dan hanya menanggihkan 0,2% pembayaran. Jumlah ini menjadi jumlah terbesar dari semua kelompok kreditur. Sementara itu, lembaga multilateral menerima USD 10,4 miliar dalam pembayaran utang, meskipun IMF membatalkan USD 0,6 miliar pembayaran utang untuk 24 dari 48 negara. Pemerintah termasuk China, Prancis, dan Arab Saudi menanggihkan USD 10,3 miliar, tetapi masih menerima pembayaran USD 11 miliar dari negara-negara termiskin (Debt Justice, 2021).

Skema DSSI yang pada mulanya hanya berlaku untuk kreditur pemerintah bilateral dan tidak memaksa partisipasi semua kreditur swasta secara berarti. Hal ini menyebabkan pembayaran utang telah menguras sumber daya negara berpenghasilan rendah selama pandemi dan menghambat kemampuan negara-negara untuk mengatasi Covid-19 dan membangun pertumbuhan ekonomi kembali. Selain kepada negara berpenghasilan rendah, DSSI harus diperluas untuk mencakup negara mana pun yang tertatih-tatih di ambang kebangkrutan di tengah respon terhadap pandemi Covid-19, terutama negara berpenghasilan menengah. Selama pandemi, negara-negara ini telah berjuang dari kurangnya ruang fiskal dan moneter untuk menangani penularan virus Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi. Berdasarkan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperkirakan bahwa antara tahun 2021–2025, minimal USD 598 miliar pembayaran layanan utang publik eksternal berisiko di 72 negara. Negara berpenghasilan menengah menyumbang 94 persen dari pembayaran ini. Hanya 49 dari 72 negara rentan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan di bawah skema penghentian utang dan restrukturisasi yang ada, menyisakan sekitar dua pertiga (USD387 miliar) dari pelayanan utang berisiko yang tidak tertutupi (UNDP, 2021).

DSSI diperlukan tetapi tidak cukup untuk mengatasi pelayanan utang berisiko. Hingga saat ini, 48 dari 73 negara yang memenuhi syarat telah mendaftar untuk prakarsa tersebut yang hanya memberikan sekitar seperempat dari potensi bantuannya. DSSI bersifat sementara dan bukan instrumen yang ditargetkan, dan kreditur swasta sejauh ini menolak ajakan untuk berpartisipasi (UNDP, 2021).

Merujuk dari *indivisibility* komitmen G20 ini, sebetulnya telah menunjukkan adanya ketidakterpisahan kepentingan di antara negara G20 dalam mendukung pemulihan di negara berpenghasilan rendah dan menengah melalui koordinasi kebijakan antara negara G20 dan lembaga internasional. Tetapi, pada implementasi komitmen tersebut masih sulit mencapai tujuan pemulihan yang setara. Di mana, komitmen terhadap ACT-A dan COVAX serta komitmen terhadap DSSI tidak maksimal dalam mengupayakan pemulihan di negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang mengakibatkan risiko pandemi masih terus berlanjut.

3.2. Diffuse Reciprocity terhadap Respon Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi dalam Rencana Aksi G20

Ruggie (1992) menjelaskan bahwa multilateralisme yang berhasil dalam prakteknya akan menghasilkan harapan timbal balik yang membaur (*diffuse reciprocity*) atau manfaat secara setara di antara negara anggota (Ruggie, 1992). Dari upaya G20 untuk mengimplementasikan respon kesehatan dan pemulihan ekonomi secara multilateral ditemukan hasil yang kurang optimal pada komitmen ACT-A dan Fasilitas COVAX serta komitmen terhadap DSSI, meskipun pada komitmen PPR yang baru berjalan masih diharapkan dapat mencapai tujuannya.

Dukungan G20 untuk menyukseskan ACT-A dan Fasilitas COVAX telah gagal dalam mencapai akses vaksin yang adil dan berimbang di antara negara berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah. Kesenjangan pembiayaan dan vaksin di negara berpenghasilan rendah semakin menciptakan situasi mencekam pada sistem perawatan kesehatan yang tidak efektif, kemunculan varian virus Covid-19 baru yang lebih menular, dan pandemi yang terus-menerus berlanjut.

Dalam hal menciptakan manfaat yang setara oleh semua negara, terutama untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah, G20 diharapkan berkomitmen kembali pada solusi multilateral pada ACT-A dan Fasilitas COVAX dengan mendukung penuh seruan transparansi dalam pemerataan pasokan vaksin. Pada dasarnya, COVAX memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan produsen vaksin untuk lebih dari 4 miliar dosis, tetapi pendistribusian pasokan vaksin sering mengalami penundaan. Tidak ada kejelasan pasti terkait antrean pesanan pasokan vaksin perusahaan, sehingga sulit untuk mengetahui apakah penundaan distribusi vaksin disebabkan oleh tantangan produksi atau perlakuan istimewa dalam pengaturan bilateral. Dengan mendesak komitmen produsen bersikap transparan tentang jadwal pesanan dapat memastikan kesempatan memperoleh pasokan dosis vaksin yang setara, terutama pada negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak lagi terbentur ke belakang antrean vaksin karena kesepakatan bilateral lainnya (Gavi, 2021).

Selain itu, G20 harus menjadikan akses vaksin global sebagai prioritas tertinggi. Besarnya kesenjangan vaksinasi di negara berpenghasilan rendah akibat penimbunan pasokan vaksin oleh negara maju. Negara-negara dengan pesanan dosis yang sementara masih belum dibutuhkan harus mengizinkan COVAX untuk mengambil posisi antrean tersebut agar dapat mengirimkan dosis ke negara yang membutuhkan pasokan vaksin Covid-19 segera. Terakhir, negara-negara berpenghasilan rendah memerlukan dukungan finansial dan teknis yang berkelanjutan untuk peluncuran vaksin Covid-19. Melalui penguatan sistem kesehatan nasional akan membantu negara-negara dalam memastikan pengiriman dosis dan mengurangi efek sekunder pandemi, serta menyisakan infrastruktur penting untuk keamanan kesehatan global di masa depan (Gavi, 2021).

Di satu sisi, upaya G20 terhadap sistem pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon (PPR) terhadap pandemi mencapai kemajuan. Pada 14 November 2022, G20 meresmikan program *Pandemic Fund* yang diusung atas dasar penguatan arsitektur kesehatan global untuk mewujudkan sistem kesehatan yang andal, inklusif, dan berkeadilan. Berdasarkan hasil riset dan koordinasi Bank Dunia dan WHO, *Pandemic Fund* membutuhkan pembiayaan sebesar USD 31,1 miliar setiap tahunnya untuk meningkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi di masa yang akan datang.

Upaya kolektif, berkesinambungan dan penuh komitmen yang telah dilakukan oleh G20 JFHTF, Bank Dunia, dan IMF, terutama kepada para donor dari negara G20, negara non-G20, serta lembaga filantropi yang telah berkontribusi dalam *Pandemic Fund*. *Pandemic Fund* ditargetkan sebagai katalisator sumber dana penanggulangan pandemi jangka panjang, insentif bagi negara-negara untuk meningkatkan investasinya di PPR, dan memperkuat koordinasi antar organisasi internasional. *Pandemic Fund* akan memainkan peran kunci dalam menjembatani kerja sama antara anggota G20, baik negara maju maupun negara berkembang, anggota non-G20, dan pemangku kepentingan, termasuk filantropis, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil (CSO). *Pandemic Fund* menunjukkan kepada dunia bahwa G20 mampu menghasilkan tindakan nyata yang dapat berdampak global (Kementerian Keuangan, 2022b). Melalui inisiatif dari program ini, G20 akan menerima manfaat dalam jangka waktu yang panjang, sebagaimana hal ini kemudian akan memajukan arsitektur kesehatan global dan menciptakan manfaat yang membaur (*diffuse reciprocity*) kepada semua negara G20 maupun non-G20.

Sementara itu, dari sisi komitmen G20 terhadap DSSI mengalami kegagalan. Dari 73 negara berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat DSSI, hanya 48 negara yang mengajukan penangguhan layanan utang dengan DSSI hanya menanggihkan USD 12,9 miliar dihitung dari April 2020 - Desember 2021. Tetapi, menjadi sebuah fakta bahwa DSSI hanya menanggihkan sementara pembayaran utang bilateral dan kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam skema tersebut menyebabkan mekanisme tersebut menjadi tidak efektif. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya desakan G20 kepada kreditur sektor swasta untuk menerapkan keringanan utang melalui skema DSSI.

DSSI seharusnya tidak membebaskan ruang fiskal bagi negara berpenghasilan rendah yang berjuang melawan Covid-19 untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditur swasta. Negara-negara yang menghadapi kesulitan utang memerlukan ruang fiskal yang memadai untuk mengatasi dampak kesehatan Covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi berkelanjutan, sehingga G20 perlu untuk mendesak semua kreditur untuk berpartisipasi. Namun, upaya G20 untuk mengatasi kesinambungan utang di tengah krisis global yang mendesak ini telah memberikan keringanan utang meskipun hanya mencapai 12,9 miliar penangguhan layanan utang. Tetapi, tindakan tersebut masih belum cukup mengingat pada situasi ketika negara-negara ekonomi maju mengalami pemulihan ekonomi akan menyebabkan kenaikan suku bunga, memicu arus keluar modal, dan depresiasi nilai tukar di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini dapat menggelembungkan utang luar negeri dan semakin memperburuk situasi krisis di negara-negara berpenghasilan rendah.

Meskipun DSSI menyediakan likuiditas yang sangat dibutuhkan sejumlah besar negara, DSSI tidak dirancang untuk menangani masalah utang struktural atau tantangan pembiayaan yang berlarut-larut. Berakhirnya G20 DSSI pada Desember 2021 menandakan bahwa negara-negara akan melanjutkan pembayaran kewajiban utang meskipun krisis global belum berakhir. Secara keseluruhan, pemulihan yang sudah rapuh di negara berpenghasilan rendah mulai terlihat semakin genting (CGD, 2022). Berdasarkan paparan tersebut, *diffuse reciprocity* atau manfaat yang setara tidak ditemukan pada pemulihan di negara berpenghasilan rendah dan menengah akibat kesenjangan vaksin dan penangguhan layanan utang yang tidak maksimal. Di satu sisi, komitmen PPR yang diperuntukkan untuk penguatan kesiapsiagaan arsitektur kesehatan di negara berpenghasilan rendah dan menengah telah menunjukkan keberhasilannya melalui pembiayaan yang telah diinvestasikan, meskipun PPR ini masih terus diharapkan dapat mencapai tujuannya untuk negara-negara berisiko di masa pandemi. Pada dasarnya, G20 telah berupaya dalam menyambung pemulihan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, meskipun hasil dari implementasi masih menyebabkan krisis yang berlanjut.

4. Kesimpulan dan Saran

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi berbagai tatanan global. Tingginya angka penularan infeksi Covid mendorong negara-negara untuk memberlakukan pembatasan sosial (*lockdown*). Tetapi pada saat yang sama, pembatasan pergerakan sosial ini justru menghadirkan tantangan baru pada

penurunan perekonomian global dan mengakibatkan negara-negara mengalami resesi ekonomi. Tantangan kesehatan, sosial, dan ekonomi yang secara bersamaan dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara G20, mendorong kerja sama multilateral untuk bersama-sama menekan kerusakan jangka panjang akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan dari hasil analisa penelitian ini, peneliti menemukan beberapa indikator yang menjelaskan kerja sama multilateral G20 dalam strategi respon kesehatan dan pemulihan ekonomi terhadap Covid-19 melalui Rencana Aksi G20 masih belum mencapai keberhasilan.

Pertama, ketidakterpisahan kepentingan (*indivisibility*) G20 mengindikasikan kepentingan nasional yang sama dengan negara G20 lainnya untuk mengatasi kerentanan sistem kesehatan dan penurunan perekonomian global. Hal ini kemudian mendorong G20 dan lembaga internasional untuk saling mengkoordinasikan kebijakan yang kemudian menghasilkan komitmen-komitmen dalam merespon pandemi Covid-19. Tetapi dalam implementasinya, G20 belum secara optimal mengupayakan kesetaraan vaksinasi pada komitmen ACT-A dan Fasilitas COVAX mengenai kesenjangan dan pembiayaan vaksinasi antara negara berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah. Di saat yang sama, komitmen terhadap DSSI yang tidak maksimal masih melonggarkan para kreditur swasta menerima pembayaran utang oleh negara berpenghasilan rendah yang mengakibatkan respon terhadap pandemi Covid-19 di negara tersebut tidak berjalan efektif. Di situasi berbeda, G20 mencapai keberhasilan dalam peresmian *Pandemic Fund* untuk mendukung pembiayaan pandemi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Inisiatif ini masih diharapkan dapat mencapai tujuannya. Kedua, multilateralisme yang berhasil memberikan manfaat yang setara (*diffuse reciprocity*). G20 telah berupaya mendorong pemulihan di negara-negara rentan dengan melakukan sejumlah komitmen Rencana Aksi G20. Tetapi dukungan tersebut tidak menciptakan manfaat yang setara di antara negara berpenghasilan tinggi dan negara berpenghasilan rendah ataupun menengah pada inisiatif ACT-A COVAX dan DSSI. Sebaliknya, inisiatif *Pandemic Fund* masih belum menunjukkan manfaat yang setara, tetapi melalui pembiayaan oleh para donor G20, non-G20, dan lembaga filantropi diharapkan dapat mendorong manfaat yang setara bagi negara-negara rentan ketika menghadapi pandemi di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil dari analisa penelitian ini, peneliti merekomendasikan dan memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk menelaah lebih lanjut terkait kerja sama multilateral G20 dalam menopang pemulihan yang berkelanjutan di negara berpenghasilan rendah dan menengah pasca pandemi Covid-19, terutama pada inisiatif *Pandemic Fund* yang perlu untuk melihat kelanjutan dari implementasinya yang mendukung penguatan arsitektur kesehatan di negara-negara yang rentan.

Referensi

- Bureau of Labor Statistics. (2020). *Unemployment rate rises to record high 14.7 percent in April 2020*. The Economics Daily. <https://www.bls.gov/opub/ted/2020/unemployment-rate-rises-to-record-high-14-point-7-percent-in-april-2020.htm>
- CGD. (2022, January 18). *Fix the Common Framework for Debt Before It Is Too Late | Center for Global Development | Ideas to Action*. CGD. <https://www.cgdev.org/blog/fix-common-framework-debt-it-too-late>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Debt Justice. (2021, October 12). *G20 initiative leads to less than a quarter of debt payments being suspended - International Debt Charity | Debt Justice (formerly Jubilee Debt Campaign)*. Debt Justice. <https://debtjustice.org.uk/press-release/g20-initiative-leads-to-less-than-a-quarter-of-debt-payments-being-suspended>
- G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting. (2020). *G20 Action Plan. April 15, 1*. <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/world/G7-G20/G20-Documents/2020-04-15-Finance-Ministers-Central-Bank-Governors->

Meeting.pdf?__blob=publicationFile&v=4

G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting. (2021). Fourth Progress Report on the G20 Action Plan. *Federal Ministry of Finance, October 13*. https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/world/G7-G20/G20-Documents/Italy/2021-10-13-g20-annex-1.pdf?__blob=publicationFile&v=2

G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting. (2022). *Communiqué. February 2022, 1-8*. <https://www.bi.go.id/en/G20/Documents/G20-Communique.pdf>

G20 Riyadh Summit. (2020a). *G20 Support to COVID-19 Response and Recovery in Developing Countries. 1-7*.

G20 Riyadh Summit. (2020b, March 26). *Extraordinary G20 Leaders' Summit: Statement on COVID-19*. G20 Research Group. <http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-statement-0326.html>

G20 Rome Leaders' Declaration. (2021). *G20 Rome Leaders' Declaration. April, 1-20*.

Gavi. (2021, September 6). *The G20 Must Recommit to COVAX | Gavi, the Vaccine Alliance*. Gavi. <https://www.gavi.org/vaccineswork/g20-must-recommit-covax>

Gavi. (2022). *COVAX vaccine roll-out | Gavi, the Vaccine Alliance*. Gavi. <https://www.gavi.org/covax-vaccine-roll-out>

IFPMA. (2021, May 21). *COVID-19 vaccine makers invite G20 leaders to support the five steps to urgently advance COVID-19 vaccine equity - IFPMA*. IFPMA. <https://ifpma.org/news/covid-19-vaccine-makers-invite-g20-leaders-to-support-the-five-steps-to-urgently-advance-covid-19-vaccine-equity/>

Jubilee Debt Campaign. (2021). *How the G20 debt suspension initiative benefits private lenders. Jubilee Debt Campaign, October, 1-8*. https://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2021/10/How-the-G20-debt-suspension-initiative-benefits-private-lenders_10.21.pdf

Kementerian Keuangan. (2022a, September 9). *Apresiasi Pertemuan Pertama Dewan Pengurus PPR-FIF, Menkeu : Pertemuan Ini Tonggak Penting Penguatan Arsitektur Kesehatan Global*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Apresiasi-Pertemuan-Pertama-Dewan-Pengurus-PPR-FIF>

Kementerian Keuangan. (2022b, November 13). *Pandemic Fund: Langkah Konkret G20 yang Berdampak Global*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pandemic-Fund-Langkah-Konkret-G20>

Kompas. (2021). *Bahas Kesenjangan Vaksin Covid-19 di Dunia, Jokowi: Negara Berkembang Hanya Dapat 17 Persen*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/22/06070451/bahas-kesenjangan-vaksin-covid-19-di-dunia-jokowi-negara-berkembang-hanya>

NPR. (2022, January 14). *Interactive map shows global COVID vaccination rates. 36 nations are under 10% : Goats and Soda : NPR*. NPR. <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2022/01/14/1072188527/for-the-36-countries-with-the-lowest-vaccination-rates-supply-isnt-the-only-issu>

OECD. (2020). *OECD Economic Outlook, Interim Report September 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/34FFC900-EN>

Povlo, J. (2022, November). *G20 Event Recap: Redesigning Pandemic Prevention, Preparedness, and Response - Joep Lange Institute*. Joep Lange Institute. <https://www.joeplangeinstitute.org/featured/g20-event-recap-redesigning-pandemic-prevention-preparedness-and-response/>

Reuters. (2020, April 15). *G20 countries agree debt freeze for world's poorest countries | Reuters*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-g20-statement-idUSKCN21X29A>

- Ruggie, J. G. (1992). Multilateralism: the anatomy of an institution. *International Organization*, 46(3), 561–598. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027831>
- Samman, E. (2022). *Monitoring G20 contributions to global Covid-19 vaccine equity: issues and options*. <https://odi.org/en/publications/monitoring-g20-contributions-to-global-covid-19-vaccine-equity-issues-and-options/>
- Share America. (2022, December 29). *U.S. sends COVID-19 vaccines worldwide [December 2022] | ShareAmerica*. Share America. <https://share.america.gov/us-sends-covid-19-vaccines-worldwide-december-2022/>
- UNDP. (2021, April 1). *New UNDP study reveals the magnitude of limited debt relief eligibility for developing economies | United Nations Development Programme*. UNDP. <https://www.undp.org/press-releases/new-undp-study-reveals-magnitude-limited-debt-relief-eligibility-developing-economies>
- UNICEF. (2021, October 27). *G20 members have received 15 times more COVID-19 vaccine doses per capita than sub-Saharan African countries*. UNICEF. <https://www.unicef.org/press-releases/g20-members-have-received-15-times-more-covid-19-vaccine-doses-capita-sub-saharan>
- Unidas, N. (2021). *Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean 2020*. ECLAC. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46504>
- United Nations. (2021). *The impact of COVID-19 on the LDC category*. 13(13). <https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/CDP-excerpt-2021-2.pdf>
- United Nations. (2022). *UN analysis shows link between lack of vaccine equity and widening poverty gap*. United Nations. <https://news.un.org/en/story/2022/03/1114762>
- World Bank. (2022a, March 10). *Debt Service Suspension Initiative*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative>
- World Bank. (2022b, June 30). *FAQs: Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/pandemics/brief/factsheet-financial-intermediary-fund-for-pandemic-prevention-preparedness-and-response>
- World Bank. (2022c, September 9). *New Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response Formally Established*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/09/09/new-fund-for-pandemic-prevention-preparedness-and-response-formally-established>
- World Health Organization. (2020). *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 71 (Issue March)*. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general->
- World Health Organization. (2021). *ACT-Accelerator Strategic Plan & Budget: October 2021 to September 2022*. In WHO. World Health Organizations. <https://www.who.int/publications/m/item/act-accelerator-strategic-plan-budget-october-2021-to-september-2022>
- World Health Organization. (2022). *Access to COVID-19 tools funding commitment tracker*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-tracker>
- Wouters, O. J., Shadlen, K. C., Salcher-Konrad, M., Pollard, A. J., Larson, H. J., Teerawattananon, Y., & Jit, M. (2021). Challenges in ensuring global access to COVID-19 vaccines: production, affordability, allocation, and deployment. *Lancet (London, England)*, 397(10278), 1023. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00306-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00306-8)